

Analysis of the Role of the Inspectorate in Supervision of Village Funds in Deli Serdang Regency

Analisis Peran Inspektorat dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang

Melsa Siagian¹⁾; Nur Ahmadi Bi Rahmani²⁾

^{1,2)} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Medan

Email: ¹⁾ melsasiagian759@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [15 Mei 2022]

Revised [03 Juni 2022]

Accepted [22 Juni 2022]

KEYWORDS

inspectorate, village funds
Development Against,
internal audits

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisis gambaran pelaksanaan peran dan fungsi inspektorat dalam pengawasan dana desa di kabupaten deli serdang serta kendala kendala yang dihadapi oleh desa Desa yang ada di kabupaten deli serdang. secara teknis metode ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara operasional aktivitas serta lakon yang dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten deli serdang dengan demikian sumber datanya adalah orang orang atau pengawas hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran pengawasan melalui audit internal terhadap penyelenggara dana desa di kabupaten deli serdang telah dilakukan dengan baik, meski demikian terdapat juga beberapa kelemahan mengenai penyelenggara dana desa di kabupaten deli serdang.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the description of the implementation of the role and function of the inspectorate in supervising village funds in the Deli Serdang Regency as well as the obstacles faced by the villages in the Deli Serdang Regency. Technically this method uses a descriptive method with a qualitative approach, namely by describing its operational activities and plays carried out by the deli Serdang district inspectorate, thus the data sources are people or supervisors. The results of the study conclude that the supervisory role through internal audits of village fund organizers in Deli Serdang district has been carried out well, although there are also some weaknesses regarding the organizers. Village Funds in Deli Serdang Regency.

PENDAHULUAN

Dalam pengawasan atas penyelenggara urusan dana desa di kabupaten deli serdang masih banyak di jumpai kelemahan dan hambatan sehingga pengawasan intern belum mampu berperan sebagai Quality assurance yaitu menjamin sebuah kegiatan dapat berjakan dengan efektif dan efisien sehingga pengawasan intern belum mampu berperan sebagai sesuatu aturan dalam menitikberatkan pelaksana tugas Penyelenggara Dana Desa pelaksana tugas pengawasannya dengan melakukan tindakan prevektif yaitu mencegah terjadinya pelencengan dana desa serta memperbaiki kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan Bansos (Bantuan) kepada masyarakat yang ada di kabupaten deli serdang . serta memperbaiki kesalahan kesalahan yang pernah terjadi untuk dijadikan pelajaran, agar kejadian tersebut tidak terulang dimasa yang akan datang. Untuk pengoptimalan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, maka pengawasan harus ditingkatkan.

Memperhatikan faktor faktor yang mempengaruhi kualitas dari pengawas tersebut demi mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Deli serdang sebagai salah satu daerah yang dinamis, dalam hal pembangunan juga melakukan tugas pengawasan yakni oleh inspektorat kabupaten deli serdang, tetap melakukan tugas pengawasan yang baik pengawan reguler maupun pengawasan tujuan tertentu. Berdasarkan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat kabupaten deli serdang melakukan pemeriksaan reguler terhadap 380 desa sebagai objek pemeriksaan dan pengawasan Dana desa di kabupaten deli serdang terdapat pengaduan laporan keuangan di salah satu desa yang diperiksa oleh inspektorat kabupaten deli serdang.

Berdasarkan pengamatan sementara ,inspektorat kabupaten deli serdang termasuk aparaturnya pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah belum menunjukkan peran yang menggembarakan. hal ini sejalan dengan yang dikemukakan khairudin (2008)

kualitas hasil pemeriksaan inspektorat kabupaten deli serdang bahwa kurang kemampuan dari aparatur pengawas intern pemerintah yang ada di inspektorat kabupaten deli serdang untuk mengungkapkan penyimpangan yang ada di sebabkan aparat pengawas inspektorat kabupaten deli serdang, penelitian idealnya bertujuan untuk menilai kebenaran kecermatan kredibilitas efektif dan efisiensi dan kendala informasi pelaksanaan tugas SKPD belum mampu menunjukkan peranan pengawasan tersebut sebagai jaminan (Quality Insurance) dalam pengantisipasi terjadinya penyimpangan di pemerintahan kabupaten deli serdang.

LANDASAN TEORI

Sering orang menyebutnya pemeriksa (pengawas atau auditor) dalam penelitian ini juga memiliki arti yang sama yaitu : pengawasan Dana Desa di kabupaten Deli serdang yang mempunyai jabatan fungsional atau auditor atau pihak lain yang diberi tugas wewenang tanggung jawab secara penuh oleh jabatan yang berwenang yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. Inspektorat kabupaten deli serdang merupakan bagian satuan kerja perangkat daerah yaitu (SKPD) Yang ada di pemerintahan daerah kabupaten deli serdang.

Proses mutasi pada inspektorat kabupaten deli serdang terdiri dari beraneka ragam latar belakang pendidikan yang ada .latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh inspektoratv kabupaten dwli serdang terdiri dari latar belakang pendidikan ekonomi, hukum, sosial dan politik. Latar belakang pendidikan ini mempunyai peran yang sangat penting, SKPD inspektorat kabupaten deli serdang terdiri dari berbagai bidang untuk itu keanekaragaman pendidikan sangat berguna dalam proses pemeriksaan oleh staff inspektorat kabupaten deli serdang. Latar belakang pendidikan pemeriksaan adalah auditor harus mempunyai pendidikan nominal pendidikan S1 atau yang setara untuk diperlukan pengembangan teknik dan metodologi pemeriksaan melalui pelatihan pelatihan yang perlu harus di evaluasi periodik.

Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu usaha sistematis untuk membandingkan kinerja dengan standart ,rencana,atau tujuan yang ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standard rencana apakah sumber daya telah dikerjakan secara efisien dan mengartikan pengawasan pengawasan mendeterminasi apa saja yang telah dilaksanakan . maksud nya pekerjaan sesuai rencana yang telah ditetapkan .pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang mendasar, sehingga membutuhkan seorang pimpinan untuk menjalankan pekerjaan organisasi.pengawasan merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan sesuai dengan kriteria norma norma standar atau rencana rencana yang telah di tetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

Pengawasan Internal

Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara internal diperlukan suatu alat kendali manajemen, pengawasan internal akan di evaluasi dalam internal audit untuk memastikan telah berjalan dengan baik oleh karena itu internal audit dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang memberikan nilai tambahan bagi organisasi yang melakukan pemeriksaan audit disebut auditor atau pengawas. internal auditor adalah pihak baik perorangan maupun unit lembaga yang melaksanakan internal audit. Audit internal adalah fungsi penilaian independen yang bentuk dalam pemerintahan untuk mengevaluasi aktivitas aktivitas pemerintahan terkhususnya di kabupaten deli serdang. Dengan fungsi seperti ini internal auditor mengidentifikasi masalah yang ada di pemerintahan di kabupaten deli serdang seperti Dana Desa . dengan demikian internal auditor harus dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja manajemen dan harus proaktif dengan menjamin komunikasi dengan desa desayang ada di kabupaten deli serdang.

Independen dalam pengertian ini diartikan bahwa unit yang dilaksanakan dalam struktur organisasi dan pelaporannya. objektif artinya dengan kerangka berfikir yang tepat dari unit yang melaksanakan audit kegiatan internal audit dilaksanakan untuk mengevaluasi resiko yang terkait dan sistem informasi dan menilai sejauh mana fungsi pengendalian internal mencapai tujuan

Selama beberapa abad internal audit hanya di anggap sebagai pekerjaan administrasi sederhana yang meliputi pengecekan dokumen ,melaporkan kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak

atasan ,namun saat ini pendekatan terhadap internal audit jauh berbeda lebih tepatnya mengalami prluasan konsep seiring dengan perkembangan waktu ,serta perkembangan tuntutan pada masyarakat tepatnya di desa desa yang ada di kabupaten deli serdang

Pengawasan Internal Pemerintah

Pengawasan intern pemerintah sebagaimana di sebutkan dilaksanakan oleh aparat pengawasan pemerintah,yaitu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsimerupakan pengawasan yang terdiri atas kedudukan tugasda fungsi inspektorat kabupaten deli serdang .

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah pelaksanaan pembinaan atas penyelenggara pembinaan dan penyelenggara pemerintah Desa dan pelakasana urusan desa.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan apatur pengawas intern pemerintah melaksanakan kegiatan pengawasan yang terdiri dari

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen objektifdan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran dan kecermatan kredibilitas efektivitas dan efesiensi dan

Keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Evaluasi adalah adalah rangkaian kegiatan [erbandingan hasil prestasi suatu kegiatan dengan standar,rencana dan norma yang telah di ditetapkan dan menentukan fator faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagaln suati kegiatan dalam mencapai tujuan

Riviu adalah penelaan ulang bukti kegiatan suatu kegoiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan standart,rencana atau norma yang telah di ditetapkan.

Pemantauan adalah proses penilaian suatu program dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah di ditetapkan

Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan selain audit,evaluasi, riview,dan pemantauan oleh instansi dalam rangka melaksanakan konsultasi kegiatan lain nya melalui suatu kedekatan keilmuanyang sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen resiko pengendalian, dan proses tata kelola sehingga memberikan nilai tambah untuk meningkatkan pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif adalah penelitian yang di arahkan untuk memberikan gejala gejala,fakta fakta,atau kejadian kejadian secara akurat dan sistematis mengenai sifat sifat populasi daerah tertentu penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai penguasaan inspektorat terkhusus nya inspektorat di kabupaten deli serdang serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenan dengan peranan pengawasan penyelenggara urusan pemeritahan di daerah dalam tugas pengawasan pada inspektorat kabupaten deli serdang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara penelitian

Penelitian terhadap bagaimana pengawasa perwujutan peran dan fungsi inspektorat di kabipaten deliserdang terhadap masalah dana Desa dilakukan melalui pendeskripsian dari beberapa indikasi tindakan secara detail berdasarkan dari hasil wawancara penelitian demikian secara operasional sehingga nantinya menjadi suatu kesatuan tentang bagaimana sebenarnya tadi telah dilaksanakan di kabupaten deli serdang

Alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten (peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11) dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud regonisi negara kepada desa. Bagian dari dana pertimbangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten deli serdang untuk desa paling sedikit 10 persen dari distribusi proporsional untuk setiap desa (warsono 2014)

Pengelolaan alokasi dana desa yang membantu beberapa prinsip pengelolaannya yaitu :

1. Perencanaan. Untuk menyusun kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) harus diawali dengan perencanaan musyawarah perencanaan . musyawarah rencana pembangunan tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip masyarakat desa. Musdabangres ini adalah musyawarah Desa (BPD) ,pemerintah desa (pemdes) unsur masyarakat yang di selenggarakan oleh PBD untuk menyetujui hal-hal yang strategis sdesa untuk penataan desa
2. Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan bersumber dari alokasi Dana Desa yang ada di inspektorat kabupaten deli serdang sepenuhnya di laksanakan oleh tim pelaksana Desa (TPD) untuk mendukung keterbukaan dan menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik alokasi dana desa terkhususnya di kabupaten deli serdang
3. Pertanggung jawaban. Dalam melaksanakan tugas wewenang hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan . laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang di sampaikan oleh bupati kabupaten deli serdang
4. Pengawasan. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan berjalan dengan baik, tujuan pengawasan meliputi :
 - a. Mengetahui bagaimana masukan input sumber-sumber Dalam rencana digunakan
 - b. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan
 - c. Apakah waktu implementasi terpenuhi secara tepat, atau tidak.
 - d. Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan

Dengan demikian pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang di harapkan dan apa yang dilakukan.

Transparasi

Atas pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa untuk menghindari terjadinya peralihan Dana desa .

Transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik yang dijaminnya kemudian didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai . transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas wewenang , ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi, dan penjabarannya .

Anggaran

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan (planing) perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien ditentukan oleh adanya perencanaan berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Informasi yang di peroleh dari anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang di nyatakan dalam satuan uang barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang.

Hasil wawancara penelitian menjelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan senantiasa berpedoman pada pemerrintahan bermanfaat untuk menemukan pemenuhan informasi keuangan yang berkualitas bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi sosial maupun politik. Berikut disajikan beberapa petikan yang menguatkan analisis ini:

Kami secara institusional bertanggung jawab kepada masyarakat karena secara nyata kami juga merupakan bagian dari pelayanan publik setiap melaksanakan audit lingkungan pemerintah daerah kabupaten deli serdang, kami selalu mengedepankan tuntutan kejujuran dan kepatutan dari apa yang di nilai dilapangan.

Hasil wawancara di jelaska sebagai berikut :

Hasil laporan audit yang telah di telah disusun oleh tim pelaksana audit yang ditunjukkan harus dapat penanggung jawab secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu, demikian pekerjaan audit tidak dilaksanakan hanya sebagai rutinitas belaka secara etika ini hasilnya akan menentukan dan menyangkut kepentingan efektivitas organisasi perangkat daerah kami sebagai audit menyadari laporsn hasil audit dapat dipercaya dan menjadikan tolak ukur keberhasilan daerah melaksanakan pembangunan di kabupaten deliserdang. Kendala kendala yang di hadapi dalam optimalisasi pelaksanaan peran dan fungsi pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten deli serdang

Berhasilnya penyelenggara tugas pengawasan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemsyarakatan tergantung pada sumber manusia aparatur negara khususnya pegawai negri sipil. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut dalam rangka menguwudkan masyarakat yang taat hukum pemberadapan modre dan demogratis adil dan bermoral tinggi,

Seiring dengan arah kebijakan pengawasan pemerintahan inspektorat dikabupaten deliserdang senantiasa memfokuskan secara cermat objek dan sasaran pengawasan yang bersifat pengawasan dan strategis dan penyelenggara pelayanan secara adil dan kepada masyarakat dilandasi kesetiaan ketaan kepada pancasila dan UUD 1945

Dalam rangka pengoptimalan, peran dan fungsi sebagai internal auditor inspektorat kabupaten deli serdang juga masih memiliki kelemahan seperti kelemahan sumber daya manusia yang masih sedikit serta belum tersedianya standart operasional dalam melaksanakan tuga pemeriksaan. Pelaksanaan pengawasan perencanaan anggaran juga belum berjalan sehingga pencegahan dini atas penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan belum terlaksana dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksana tanggung jawab pekerjaan pengawasan dana desa kabupaten deliserdang melalui peran inspektorat di lingkungan kerja kabupaten deli serdang pada proses operasional dan audit itu sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peran fungsi inspektorat terhadap pengawasan dana desa telah dilaksanakan dengan baik meskipun demikian terdapat pula beberapa informasi kelemahan bagi penyelenggara dana desa yang ada di kabupaten deli serdang

Dalam rangka pengoptimalan peran, dan fungsinya sebagai pengawasan kendala kendala seperti sumber daya manusia yang masih sedikit belum terjadinya operasional prosedur dalam melaksanakan pemeriksaan. Peranan inspektorat yang masih dominan dan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan kegiatan dan anggaran belum terlaksana maksimal.

DAFTAR PUSAKA

- Akmal .2006. Pemeriksaan Audit
- Bungin M.burhan 2007 Penelitian Kualitatif Jakarta . Kencana Prenada Media Group
- Robet Tambubolon Internal Audit (Alex Media Kompotindo 2016) Suatu Sarana Good Governance Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol 1 Dan 2 Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah Tentang Kode Etik Aparat Penawasan Daerah

Peraturan Dalam Negri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Dalam Negri No 23 Tahun 2007
Tentan Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah